

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN**  
**Studi Di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan**

**TESIS**



*Oleh :*

**PARDAMEAN SIREGAR**

**NPM. 051801030**

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**M E D A N**

**2007**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN**  
**Studi Di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan**

**TESIS**

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)  
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



*Oleh :*

**PARDAMEAN SIREGAR**

**NPM. 051801030**

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**M E D A N**

**2007**

PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan oleh :

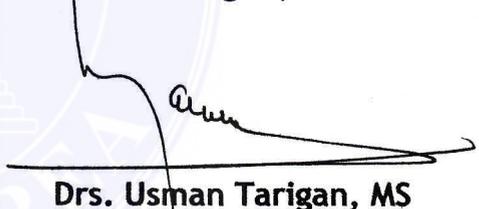
**N a m a** : PARDAMEAN SIREGAR  
**N I M** : 051801030  
**PROGRAM** : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
**JUDUL** : **Implementasi Program Pemberdayaan Kelurahan  
di Kecamatan Medan Belawan – Kota Medan**

**Pembimbing I,**



**Drs. Kariono, MA**

**Pembimbing II,**



**Drs. Usman Tarigan, MS**

**Ketua Program Studi ,**



**Drs. Kariono, MA**

**Direktur,**



**Drs. Heri Kusmanto, MA**

*Telah diuji pada Tanggal 10 Mei 2007*

---



***Panitia Penguji Tesis :***

Ketua : Drs. Heri Kusmanto, MA  
Sekretaris : Ir. Zoelhery Noer, MP  
Anggota I : Drs. Kariono, MA  
Anggota II : Drs. Usman Tarigan, MS  
Penguji Tamu : Drs. Miftahuddin, MBA

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN STUDI DI KECAMATAN MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN

**N A M A** : Pardamean Sregar  
**N I M** : 051801030  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Drs. Drs. Kariono, MA  
**Pembimbing II** : Drs. Usman Tarigan, MS

Pada saat pemerintah memberlakukan peraturan tentang otonomi daerah dengan berbagai ragam model dan mekanisme dalam sejarah negara Indonesia seketika itu posisi studi kebijakan publik menjadi penting. Terutama dalam proses implementasi misalnya harus dilihat dalam struktur yang paling bawah karena langsung memiliki keterkaitan dengan kualitas pelayanan publik. Implementasi Program Pemberdayaan Kelurahan dalam tesis ini mencoba mendeskripsikan tentang pelaksanaan kebijakan terutama tentang pelaksanaan instruksi Walikota Medan Nomor: 141/079/INST.

Penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah proses Implementasi Program Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan? Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses Implementasi Program Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan? Sedangkan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelurahan yang berlokasi di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, dan mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam Implementasi Program Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sample yang dipilih adalah para lurah yang berjumlah 6 orang. Wawancara mendalam dilakukan kepada responden terpilih diantaranya camat, petugas pengawas kelurahan, kepala lingkungan, dan tokoh masyarakat yang dinilai tepat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kepala kelurahan selaku Implementator tunggal dalam pelaksanaan kebijakan ini – sesuai yang tercantum dalam Instruksi Walikota Medan Nomor 141/079/INST – sudah cukup berhasil dalam melaksanakan instruksi ini, hal ini dapat dilihat secara nyata dari aspek kebersihan kota, penjagaan keamanan, ketertiban, pembinaan dan pelayanan masyarakat di Kota Medan. Namun beberapa permasalahan dasar yang perlu diperhatikan adalah dan perlu menjadi sorotan khusus adalah timbulnya kesan Program Pemberdayaan Kelurahan adalah kebijakan setengah hati dari Pemerintah Kota Medan, hal ini terlihat dari masih tingginya ketergantungan pemerintah kelurahan pada pemerintah kota dalam mengimplementasikan Program Pemberdayaan Kelurahan seperti yang tertuang dalam Instruksi Walikota Nomor 141/079/INST. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa secara keseluruhan tingkat kebersihan kota masih dalam level yang memprihatikan kecuali pada daerah inti kota, semakin sulitnya masyarakat mendapatkan rasa aman, semrawutnya kota dengan reklame, dan tingginya tingkat kekecewaan masyarakat terhadap pola pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah.

Key words : *implementasi program, pemberdayaan kelurahan.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Adapun judul Tesis ini adalah "Implementasi Program Pemberdayaan Kelurahan Studi Di Kecamatan Medan Belawan Kota MedanK".

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H.M. Ya`kob Mantondang, MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur PPs Universitas Medan Area,
3. Bapak Drs. Kariono, MA, Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, sekaligus sebagai pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis .
4. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, Pemabantu Direktur II PPs UMA, sekaligus sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis .
5. Bapak Drs. Abdillah, SE,Ak. MBA, Walikota Medan atas Izin Belajar yang diberikan serta dorongan moril demi kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

Terimakasih pula kepada kedua orangtua, istri dan anak-anaku, dan keluarga, yang tidak pernah putus memberikan semangat dan do'a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat balasan yang berlipat ganda  
serta mendapat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wata'ala,  
Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, April 2007

Penulis

Pardamean Siregar

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
ABSTRAKSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Sistemmatika Penulisan.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kebijakan Publik.....	10
2.1.1. Implementasi kebijakan .....	13
2.1.2. Model Komunikasi Program.....	15
2.2. Pemberdayaan Masyarakat .....	19
2.2.1. Pengertian Pemberdayaan .....	19
2.2.2. Prinsip Pemberdayaan .....	23
2.2.3. Bentuk Pemberdayaan .....	24
2.2.4. Proses Pemberdayaan.....	25
2.3. Program Pemberdayaan Kelurahan di Kota Medan .	28
2.3.1. Pengertian Program .....	28
2.3.2. Program Pemberdayaan Kelurahan.....	29
2.4. Pemerintah Kelurahan .....	38

<b>BAB III</b>	<b>:</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
		3.1. Bentuk Penelitian.....	41
		3.2. Tempat Penelitian.....	41
		3.3. Populasi dan Sampel . .....	41
		3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	42
		3.5. Defenisi dan Operasionalisasi Konsep .....	43
		3.6. Tehnik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>:</b>	<b>DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
		4.1. Gambaran Umum Kota Medan .....	46
		4.1.1. Kondisi Geografis .....	46
		4.1.2. Asal Usul Perkembangan Kota Medan.....	48
		4.2. Kecamatan Medan Belawan.....	51
<b>BAB V</b>	<b>:</b>	<b>PENYAJIAN DAN ANALISA DATA</b>	
		5.1. Implementasi Program Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Medan Belawan.....	53
		5.1.1. Kebersihan .....	54
		5.1.2. Keamanan .....	66
		5.1.3. Ketertiban.....	77
		5.1.4. Pembinaan Masyarakat .....	87
		5.1.5. Pelayanan Masyarakat .....	95
		5.2. Faktor Penghubung dan Penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat.....	102
		5.2.1. Faktor Pendukung .....	106
		5.2.2. Faktor Penghambat .....	108
		5.3. Analisa Data .....	111

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1. Kesimpulan .....	126
6.2. Saran-Saran .....	129

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>160</b>
----------------------------	------------

**L A M P I R A N**

## DAFTAR TABEL

<b>NO TABEL</b>	<b>JUDUL TABEL</b>	<b>Hal</b>
5.1	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan tentang Tingkat Kebersihan Kelurahan yang Dipimpin.....	54
5.2	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan tentang Tim Khusus yang Menangani Urusan Kebersihan.....	55
5.3	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Tim Atau Petugas Kebersihan Apakah Diberikan Upah.....	56
5.4	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Asal Dana Untuk Peralatan Pengelolaan Kebersihan .....	57
5.5	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Dana yang Tersebut Diatas Sudah Mencukupi Untuk Pengelolaan Kebersihan.....	58
5.6	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Jika Dana Pengelolaan Kebersihan Belum Mencukupi, Usaha Apa yang Telah/Akan Dilakukan Pihak Kelurahan .....	59
5.7	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Pengawasan Lurah Terhadap Petugas Kebersihan dalam Menjalankan Tugasnya Sehari-hari .....	60
5.8	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Alokasikan Dana untuk Menghindari Gangguan Keamanan	66
5.9	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan tentang Bagaimana Kelurahan Menghindari Gangguan Keamanan	67
5.10	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Warga dan Organisasi Pemuda Dilingkungan ini Digerakkan untuk Bergotong Royong dan Berpartisipasi untuk Menjaga Keamanan	68

5.11	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan tentang Bagaimana Kelurahan ini Melakukan Pengawasan dan Pemeliharaan Terhadap Lampu Penerangan Jalan/Umum	69
5.12	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan tentang Apakah Di Kelurahan ini Terdapat Pos Siskamling .....	69
5.13	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan tentang Apabila Terdapat Pos Siskamling, Apakah Selalu Ada Petugas Jaga .....	70
5.14	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Jika Terjadi Konflik Antar Warga, Siapakah Yang Mencoba Mendamaikan .....	71
5.15	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Adakah Upaya Preventif Terhadap Munculnya Konflik.....	72
5.16	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan tentang Upaya Preventif Terhadap Munculnya Konflik .....	72
5.17	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah di Kelurahan Ini Terdapat Pedagang K-5	77
5.18	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Lurah Memberikan Izin Pemakaian Jalan untuk Keperluan Tertentu .....	78
5.19	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Bapak atau Pihak Kelurahan Pernah Mengambil Tindakan Terhadap OKP atau Pihak Lain yang Melakukan Pungutan Liar .....	79
5.20	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah di Kelurahan ini Ada Bangunan yang Menyalahi Aturan Tata Ruang Kota Misalnya Tidak Memiliki IMB	80
5.21	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang di Kelurahan ini Adakah Petugas yang Diberikan Kewenangan Khusus Untuk Menangani Masalah Ketertiban	81
5.22	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Kelurahan Melakukan Tatap Muka Dengan Tokoh Masyarakat/Masyarakat untuk Menjelaskan Program Pemerintah .....	87

5.23	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Tingkat Antusiasme Warga Pada Acara Sosialisasi Tersebut	88
5.24	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Cara yang Ditempuh Pihak Kelurahan untuk Melakukan Pembinaan Pada Warga .....	89
5.25	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Pemerintah Kelurahan Melakukan Pendekatan Kepada Tokoh Masyarakat Atau Alim Ulama untuk Bersama-Sama Melakukan Pembinaan Warga .....	90
5.26	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Ada Ketetapan Yang Mengatur Tugas, Wewenang, dan Metode yang di Pakai Pemerintahan dalam Menjalankan Fungsi Pelayanan Masyarakat .....	95
5.27	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan Masyarakat Apakah Ada Tarif yang Ditetapkan .....	96
5.28	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Aparat Kelurahan Menerima Dana yang Diberikan Oleh Masyarakat Jika Mengurus Suatu Hal .....	97
5.29	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan tentang Waktu yang Dibutuhkan untuk Mengurus Surat-Surat Keterangan dan Sebagainya .....	97
5.30	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan tentang Bagaimana Tanggapan Kelurahan Jika Ada Keluhan Dari Masyarakat .....	98
5.31	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan tentang Apakah Ada Pelatihan Yang Diberikan Kepada Pegawai Kelurahan dalam Melaksanakan Tugasnya untuk Melayani Masyarakat .....	98

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah dan akan mengubah secara mendasar hubungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dikatakan sebagai sebuah kontra konsep dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya otonomi yang luas kepada daerah, untuk dapat menentukan sendiri seluruh urusan pemerintahan di daerah kecuali beberapa kewenangan yang menjadi domain pusat. Banyak tugas-tugas pembangunan yang didesentralisasikan terutama berkaitan dengan penyediaan pelayanan masyarakat, pembangunan prasarana perkotaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang merupakan alat pemerintah untuk menciptakan integrasi masyarakat dalam proses menjalankan program-program nasional di tingkat daerah.

Kebijakan untuk memperbesar dan memperkuat otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan hasil dari bekerjanya dua kekuatan. *Pertama*, kekuatan internal dalam negeri berupa gerakan reformasi yang melanda tanah air dengan tuntutan demokratisasi disegala bidang kehidupan. *Kedua*, kekuatan supra nasional berupa globalisasi dengan berbagai konsekuensi dan implikasinya yang memerlukan tanggap dalam negeri melalui proses

penyesuaian terhadap struktur dan mekanisme pemerintahan yang demokratis ditingkat lokal (Hoessein, 2004).

Perubahan struktur dan makna dari era sentralistis menuju era Otonomi Daerah yang lebih luas, merupakan suatu kebutuhan untuk segera melakukan reformasi pemerintahan dalam rangka mengakomodasi tuntutan di segala bidang kehidupan. Tuntutan dan tantangan dalam menjalankan demokrasi, seperti reformasi dan globalisasi dengan segala konsekuensi dan implikasinya dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Kartasmita (1996:336) juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain : *Pertama*, adalah keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang lebih besar untuk membangun prasarana dan sarana yang akan lebih mudah membuka dan menyeimbangkan kesempatan berkembangnya secara lebih cepat kondisi ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah terbelakang itu. *Kedua*, adalah keterbatasan sumber daya manusia di wilayah terbelakang, yang antara lain menyebabkan keterbelakangan itu sendiri. *Ketiga*, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang terbuka dan menganut prinsip-prinsip dasar, apalagi dengan semangat deregulasi dan debirokratisasi, dan dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi persaingan menjadi amat penting hanya bagaimana meraih kesempatan untuk hal itu, dan *Keempat*, yang berkaitan dengan ketiga hal di atas sebelumnya adalah bagaimana meraih investor swasta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Cohen and Uphoff. 1977. *Rural Development Participation*. New York : Cornell University.
- Conyers, Diana. 1991. " *An Introduction To Social Planning In The Third World* ". By Jhon Wiley & sons Ltd, 1984, Terjemahan Drs. Susetiawan. SU : " *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar*". Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. (xi, 335 hal.)
- Dunn, William N. 1994 " *An Introduction : Analysis Public Policy*. University of Pittsburgh.
- Jones, Charles O. 1996, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996, *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta : Bappenas.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. Jakarta : CIDES.
- Midgley, James. 1986. *Community Participation : History, Concepts and Controversies*. Dalam James Midgley (et. al). *Community Participation Social Development and The State*. New York : Mathew Inc.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Moenir, H.A.S. 2000. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Moleong, J.Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Oakley, Peter, et al. 1991. *Projects With People, The Practice Of Participation in Rural Development*. Geneva : International Labour Office.

- Prijono, Onny S dan A.M.W. Pranarka (penyunting). 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta : CSIS.
- Sajogyo. 1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara (BRP).
- Sastropoetro, Santoso R.A. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Alumni.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara.
- Supriatna, Tjahya. 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Suradinata, Ermaya. 1995. *Peranan Kepala Wilayah Dalam Analisis Masalah Dan Potensi Wilayah*. Bandung : Ramadhan.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan : Dalam Kondisi Era Globalisasi*. Bandung : Ramadhan.
- Suryochondro, Sukanti. 1993. *Masalah Kota Dan Perencanaan Kota*. Jakarta : Pusat Antar Universitas – Ilmu Sosial – Universitas Indonesia.
- Sutisna, P. Kiswandi, Supriyatno, E. Soewasto, WA. 1986. *Sosiologi Dan Antropologi*. Jakarta : Jemar Baru.
- Tjokromidjojo, Bintoro. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- \_\_\_\_\_. 1987. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta : Haji Masagung.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta : Gunung Agung.
- Hoessien, Benyamien. 2000. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Sebagai Tanggapan Terhadap Aspirasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Globalisasi. *Usahawan* No. 04, TH XXIX, April 2000. 3-13.
- \_\_\_\_\_. 2000. Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bisnis dan Demokrasi* No. 1 Vol. I, Juli. 9-18
- Pemerintah Kota Medan, 2001. Instruksi Walikota Medan Nomor 141/1417/INST/2001. *Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Camat Dalam Membina dan Mengawasi Program Pemberdayaan Kelurahan Di Kota*

*Medan.*

Pemerintah Kota Medan, 2001. Instruksi Walikota Medan Nomor 141/079/INST/2001. *Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Kelurahan Dalam Rangka Pemberdayaan Kelurahan di Kota Medan.*

Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nomor 65 Tahun 1999. *Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.*

Pemerintah Kota Medan. 1998. *Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Medan. Medan.*

Pemerintah Kota Medan. 1999. *Kota Medan Pintu Gerbang Indonesi Bagian Barat*, Edisi Keenam. Medan.

Pemerintah Kota Medan. 2001. *Pemberdayaan Kelurahan Dalam Perspektif Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Medan*

Pemerintah Kota Medan. 2006. *Medan Dalam Angka*. Medan : Badan Pusat Statistik Medan.

Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 140 / 099 / SK / 2001 tanggal 16 Maret 2001 *Tentang Pembentukan Tim Pembina / Pengawasan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan di Kota Medan.*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, *Tentang Penataan Ruang.*

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah.*